

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan suatu negara yang tingkat ekonomi atau perekonomiannya sedang dalam masa pembangunan dan pertumbuhan. Pembangunan yang dilakukan pada dasarnya bertujuan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia dan perekonomiannya. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah harus dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat maka perlu adanya perhatian untuk melakukan pembinaan serta perlindungan terhadap pengusaha kecil dan menengah. Hal tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan fungsi dan peranan lembaga keuangan baik bank maupun non bank, terutama dalam penyediaan dana yang diperlukan oleh pengusaha kecil dan menengah tersebut dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Bank adalah salah satu badan usaha yang memiliki posisi strategis guna mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Bank merupakan lembaga perantara keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang kemudian disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang selanjutnya disebut dengan UU Perbankan dalam Pasal 1 angka 2 yang menyatakan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Hal tersebut merupakan kegiatan pokok dari bank umum ataupun syariah.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank berdasarkan jenisnya dapat dibedakan menjadi 2 yaitu: Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit yaitu, berupa bunga dan provisi.

Dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud Kredit adalah : “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Di era globalisasi sekarang ini ketepatan sebuah informasi sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan suatu BPR untuk memenuhi kebutuhan manajemen dalam mengembangkan BPR dalam pengambilan keputusan. Bagi

perusahaan tentu menyadari akan pentingnya peranan Sistem Informasi Akuntansi yang mana menjadi alat bantu untuk membenahi keteringgalan, serta sarana peningkatan untuk berbagai kegiatan operasional dalam perusahaan terutama BPR. Menyadari pentingnya peranan sistem informasi akuntansi dalam proses berjalannya operasional kegiatan usaha maka perlu disusun sebuah sistem yang baik, yakni sistem informasi akuntansi.

Pada dasarnya Tujuan Sistem Informasi Akuntansi yaitu menyediakan informasi bagi pihak internal dan eksternal harus mempunyai tujuan sehingga mampu memberikan pedoman dalam perencanaan suatu sistem yang dapat menghasilkan informasi perencanaan dan pengendalian dalam perusahaan (Ridwan, 2010). Menurut Krismiaji (2010) pengertian sistem adalah rangkaian komponen yang dikoordinasikan untuk mencapai serangkaian tujuan, yang memiliki karakteristik meliputi; komponen, atau sesuatu yang dapat dilihat, didengar atau dirasakan; proses, kegiatan untuk mengkoordinasikan komponen yang terlibat dalam sebuah sistem; tujuan, sasaran akhir yang ingin dicapai dari kegiatan koordinasi komponen tersebut.

Menurut Moscovice dalam Zamzani dkk (2018) sistem informasi akuntansi merupakan komponen organisasi yang mengumpulkan, menggolongkan, mengolah, menganalisis, dan mengomunikasikan informasi keuangan yang relevan untuk pengambilan keputusan kepada pihak-pihak luar seperti inspeksi pajak, investor, kreditur dan pihak-pihak dalam terutama manajemen. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi memegang peranan penting dalam sebuah perusahaan termasuk bank

perkreditan rakyat . Adanya sistem informasi akuntansi yang efisien akan menghasilkan informasi yang setakar dengan keperluan. Informasi yang efisien adalah informasi yang tercapai akurat, berfungsi dan dapat dipercaya. Salah satu strategis bagi setiap instansi adalah sistem informasi akuntansi (Adel, 2013).

Selain Sistem Informasi Akuntansi dalam kegiatan perbankan khususnya Bank Perkreditan Rakyat ini juga diperlukan sebuah peendalian internal dalam sebuah proses penyaluran atau pemberian kredit.pengendalian internal ini sangat berpengaruh terhadap analisis pemberian sebuah kredit kepada debitur. Menurut Mulyadi (2013) Sistem Pengendalian Internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian, keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Pengendalian internal tidak terlepas dari penjagaan pada prosedur pemberian kredit usaha dan tidak dimaksudkan menghilangkan semua kemungkinan terjadi kesalahan dan penyelewengan, tetapi bagaimana cara usaha-usaha pengkreditan dapat dihindarkan dari keborosan waktu, tenaga ataupun dana serta tidak tergantung pada sedikit dan banyaknya tahapan yang dilalui oleh debitur, tetapi pada tahapan yang telah dilakukan dengan baik dan benar

Fenomena terjadinya kecurangan dalam BPR terkait erat dengan peran pengendalian internal dan sistem informasi akuntansi BPR, yang tidak secara sistematis mengawasi kepemimpinan dalam memantau, mengevaluasi dan

melaporkan semua proses dan tahapan kegiatan. Seperti dalam kasus kesalahan pencatatan uang di BPR Nusamba, di mana salah satu karyawan yang mengumpulkan angsuran tabungan dan kredit, harus disetor dengan uang klien namun terjadi pemerasan pada uang tunai BPR Nusamba, jumlah uang sejak November 2014 hingga Mei 2015 mencapai Rp115.429.909 (sumber dari website Pemerintah kota Yogyakarta, 2015). Kegiatan penipuan dapat dikurangi dengan adanya sistem kontrol internal dan pemantauan oleh atasan.

Kasus lain terjadi pada Oktober 2014, dugaan kasus korupsi Rp. 20 miliar di Bank Perkreditan Rakyat Aceh Utara (BPR) Sabee Meusampe, berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten 2017. Seperti diketahui, Rp. 20 miliar Dana Pemberdayaan Ekonomi Bank untuk penduduk. Namun distribusinya tidak sesuai dengan keputusan Pemerintah Daerah. Kerugian ini berasal dari dana kredit fiktif Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Bahri, (2019). Penipuan ini terjadi karena sistem kontrol internal yang rendah dan kurangnya skandal penipuan akuntansi di Indonesia. Hal ini terbukti dari likuidasi beberapa bank, yang diajukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Swasta, sehingga keberadaan kejahatan bank dan manipulasi pajak semakin meningkat.

Kegiatan penipuan dapat dikurangi dengan adanya sistem kontrol internal dan pemantauan oleh atasan. Maka dari itu sebuah sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal dalam sebuah perbankan perlu diperhatikan.

Penelitian (Effendi & Harahap, 2020) menyatakan bahwa Sistem Akuntansi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pemberian Kredit

pada PT Bank OCBC NISP Tbk Kota Batam. dan adanya pengaruh yang signifikan Pengendalian Internal terhadap Pemberian Kredit pada PT Bank OCBC NISP Tbk Kota Batam. yaitu dengan dibuktikannya peningkatan pemberian kredit dengan analisis pemberian kredit yang efektif serta menunjang peningkatan kredit lancar,

Penelitian Menurut (Ulfah & Massora, 2021) bahwa Sistem pengendalian intern merupakan suatu proses yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap aturan atau standar yang berlaku yang terlihat dari nilai informasi laporan keuangan. Sistem pengendalian intern juga menentukan nilai informasi laporan keuangan yang baik. Sistem Pengendalian Intern terkait dengan laporan keuangan merupakan suatu proses yang di desain untuk memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan laporan keuangan. Laporan keuangan menjadi pedoman dalam kebijakan perusahaan terutama dalam pemberian kredit. Sistem informasi akuntansi juga berpengaruh pada pemberian kredit. Pada dasarnya Tujuan Sistem Informasi Akuntansi yaitu menyediakan informasi bagi pihak internal dan eksternal harus mempunyai tujuan sehingga mampu memberikan pedoman dalam perencanaan suatu sistem yang dapat menghasilkan informasi perencanaan dan pengendalian dalam perusahaan, khususnya dalam pemberian kredit.

Penelitian (Sawori et al., 2018) menyatakan bahwa Sistem informasi akuntansi telah diterapkan dengan baik serta sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan. Ini dapat dilihat dari sudah terpenuhinya

karakteristik sistem informasi akuntansi dalam pembiayaan kredit usaha mikro pada . dan telah menunjang pengendalian internal pembiayaan kredit usaha mikro.

PT. BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang sebagai salah satu bank pengkreditan rakyat yang bergerak sebagai penghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali kepada individu atau UMKM dalam bentuk kredit. Dengan adanya penyaluran dana modal kerja kredit kepada masyarakat ini diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Lembaga ini didirikan untuk membantu penyediaan modal bagi golongan usaha kecil dan menengah untuk menciptakan usaha, kredit yang diberikan yaitu berupa kredit umum dan kredit pegawai.

Pendapatan terbesar bagi PT. BPR BKK UNGARAN (perseroda) adalah dari bunga kredit yang diberikan terhadap nasabah. Namun pemberian kredit ini memiliki faktor resiko yang sangat besar seperti kredit macet, dan bisa berpengaruh cukup besar pula terhadap tingkat kesehatan keuangan bank. Resiko ini disebabkan oleh adanya tenggang waktu pengembalian kredit yang menyebabkan suatu resiko kredit tidak tertagih/macet nya pembayaran kredit.

Berikut adalah data perkembangan kredit PT BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang tahun 2017-2021:

Tabel 1.1

Data perkembangan kredit PT BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang tahun 2017-2021

Tahun	Total kredit	Rasio NPL %
--------------	---------------------	--------------------

2017	14.352.340.500	10,81%
2018	17.948.318.125	8,35%
2019	19.272.379.270	7,33%
2020	19.107.434.344	8,63%
2021	19.317.587.657	12,12%

Sumber : PT BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang,2017-2021

Dari tabel diatas memperlihatkan bahwa jumlah kredit yang diberikan kepada debitur terus meningkat dari tahun 2017 sampai tahun 2021. sedangkan untuk tingkat rasio NPL masih belum stabil .Hal tersebut terjadi karena disebabkan oleh banyaknya kredit yang tidak tertagih seperti kredit macet,kredit kurang lancar dan kredit diragukan.kendala permasalahan kredit ini juga disebabkan oleh faktor internal.

Faktor internal bank yang dapat menyebabkan kredit bermasalah yakni terletak pada analisa pemberian kredit, karena proses persetujuan pemberian kredit/flowchart pada prosedur analis pemberian kredit ada yang terlewatkan yaitu pada tahap analisis data terjadi kesalahan dalam penilaian menyaring debitur yang mengajukan pinjaman atau yang dikenal dengan 5C dan formulir indikasi penilaian nasabah ada yang tertinggal dan menganalisa debitur tidak sesuai dengan fakta dilapangan atau hanya prediksi saja oleh tim marketing. Maka dari itu praktek yang terjadi di PT. BPR BKK Ungaran cabang Tuntang belum sesuai dengan sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal yang tepat sesuai prosedur. Praktek yang sesuai prosedur adalah seluruh prosedur dilaksanakan dan mengikuti prosedur yang telah ditentukan.

Kegiatan perkreditan PT. BPR BKK UNGARAN (perseroda) bisa berjalan lancar dengan adanya sistem akuntansi yang baik dan keefektifan dari pengendalian internal dalam pemberian kredit yang sesuai prosedur pemberian kredit dan pengelolaan uang yang sesuai prosedur, terutama pada salah satu bidang usaha yang bergerak pada simpan pinjam. Pemberian kredit diacukan pada Perjanjian Kredit yang telah dibuat dan disepakati antara pihak bank sebagai kreditor dan nasabah sebagai debitor. Besarnya kredit sangat bermacam macam sesuai kesepakatan antara bank dan nasabah penerima kredit. Dalam pemberian kredit, bank harus yakin dana atau plafon yang dipinjamkan kepada nasabah akan dikembalikan tepat waktu beserta bunganya dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama hal ini telah diatur dalam Pasal 8 UU Perbankan. Maka dalam penyaluran kredit bank memerlukan jaminan dari debitur

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“analisis sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal pemberian kredit PT BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan , maka penulis merumuskan masalah yang akan diteleti yaitu,

1. Bagaimana peran sistem informasi akuntansi dalam pemberian kredit pada PT BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang.?

2. Bagaimana peran pengendalian internal dalam pemberian kredit pada PT BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang.?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk menganalisis peran sistem informasi akuntansi dalam pemberian kredit pada PT BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang.
2. Untuk menganalisis peran pengendalian internal dalam pemberian kredit pada PT BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang.

D. Manfaat penelitian

1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi kemajuan akademik akuntansi dan perpajakan khususnya mengenai sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal pemberian kredit .

2. Bagi objek penelitian atau perusahaan

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk tambahan pengetahuan dan informasi terkait sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal pemberian kredit

3. Bagi penelitian lanjutan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan tolak ukur untuk penelitian selanjutnya mengenai sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal pemberian kredit.

